



DAFTAR INFORMASI

DAFTAR INFORMASI

- Data administrasi sebaran wilayah konflik
- Rekapitulasi wilayah desa yang berkonflik
- Persentase konflik disetiap sektor usaha
- Sebaran konflik disetiap daerah dan desa

SUMBER INFORMASI

- Peta Potensi Konflik Kota/ Kabupaten Badan Kesbangpol Provinsi Jambi
- Laporan Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Provinsi Jambi

PROFIL PROVINSI JAMBI

Jambi adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur, di bagian tengah Pulau Sumatera. Ibukota Provinsi ini berada di Kota Jambi. Provinsi Jambi memiliki luas wilayah 50.160,05 km², dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2024 sebanyak 3.795.579 jiwa.

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0,45° Lintang Utara, 2,45° Lintang Selatan dan antara 101,10°–104,55° Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan.

Mengelilingi provinsi Jambi, terdapat provinsi lain, yaitu Provinsi Riau di sebelah utara Provinsi Sumatera Barat di sebelah barat, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu di sebelah selatan titik letak yang demikian merupakan wilayah strategis bagi jalur perdagangan dari dulu hingga sekarang.

Provinsi Jambi memiliki 9 Kabupaten dan 2 Kota, 143 Kecamatan, 163 Kelurahan dan 1.399 Desa. Adapun Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi antara lain :

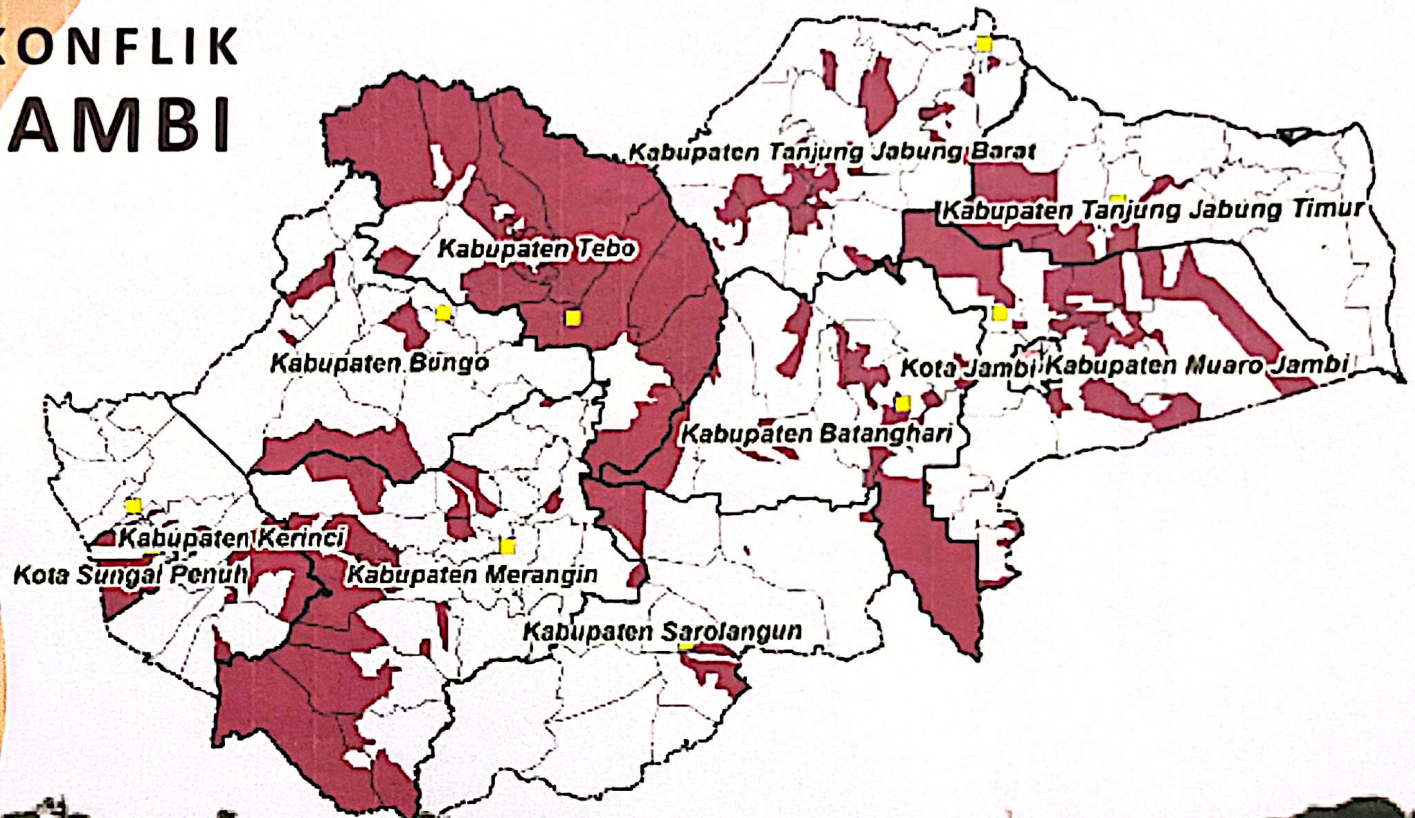
- 1. Kota Jambi**
- 2. Kota Sungai Penuh**
- 3. Kabupaten Kerinci**
- 4. Kabupaten Merangin**
- 5. Kabupaten Sarolangun**
- 6. Kabupaten Bungo**
- 7. Kabupaten Tebo**
- 8. Kabupaten Tanjab Barat**
- 9. Kabupaten Tanjab Timur**
- 10. Kab. Batanghari**
- 11. Kab. Muaro Jambi**

SEBARAN PETA KONFLIK PROVINSI JAMBI

242 DESA

Legenda :

-  Ibukota Provinsi
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa
-  Jalan Arteri
-  Jalan Kolektor
-  Jalan Lokal
-  Desa Mengalami Konflik



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI





JADWAL KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
SE-PROVINSI JAMBI

BALLROOM SWISS BEL HOTEL JAMBI, SENIN 12 FEBRUARI 2024

NO	WAKTU	KEGIATAN/MATERI	KETERANGAN
1.	07.30 - 08.00	Registrasi dengan Protokol Kesehatan dan Ramah Tamah	Panitia
2.	08.00 - 09.00	Pembukaan 1. Mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Laporan Plh. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi 3. Sambutan dan Pembukaan Acara oleh Gubernur Jambi 4. Pembacaan Doa	Protokol Abrizal, S.Sos, M.Si Dr. Al Haris, S. Sos, MH Protokol
3.	09.00 – 12.00	Penyampaian Materi Oleh : 1. Gubernur Jambi 2. Ketua DPRD Prov Jambi 3. Kapolda Jambi 4. Plt. Kajati Jambi 5. Dandrem 042/GAPU 6. Ketua KPU Jambi 7. Ketua Bawaslu Jambi	(Moderator) Sekda Provinsi Jambi) 1. Dr. Al Haris, S. Sos, MH 2. Edi Purwanto, SH.I. M.Si 3. Irjen Pol Rusdi Hartono 4. Enen Saribanon, SH., MH 5. Brigjen TNI Rachmad, S.IP 6. Iron Sahroni, S.Pd.I 7. Wein Arifin, S.IP, M.IP
4.	12.00 - 13.00	Insoma	
5.	13.00 – 15.30	Paparan Masing-Masing Kabupaten/Kota, Diskusi Tanya Jawab	Bupati/Walikota Se-Provinsi Jambi
6.	16.00 -Selesai	Penutup dan Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri	Protokol

Jambi, 12 Februari 2024

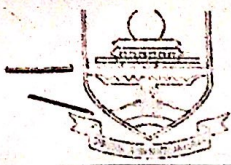
Pih. **KEPALA BADAN,**



ABRIZAL, S.Sos, M.Si

Pembina TK I (IV/b)

NIP. 19661026 198512 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. R. M. Nur Admadibrata No. 4 Telp./ Fax (0741) 62486 - 62322

NOTULEN RAPAT

RAPAT KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DALAM RANGKA MENDETEKSI SECARA CEPAT POTENSI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN JELANG PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK SERTA PENANGANAN ISU-ISU AKTUAL PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

TEMPAT: BALLROOM SWISS BELL HOTEL JAMBI
SENIN, 12 FEBRUARI 2024

I. IDENTITAS RAPAT :

1. Dasar : Surat Persetujuan Gubernur Jambi pada Nota dinas nomor 47/bakesbangpol-5.1/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 tentang Persetujuan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jambi. Tentang Rakor Forkopimda dalam Rangka Mendeteksi secara cepat potensi gangguan keamanan dan ketertiban jelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak serta Penanganan Isu-isu Aktual Provinsi Jambi Tahun 2024, Guna Mensukseskan Pemilu 2024.
2. Waktu/ Tempat : Senin, 12 Februari 2024/ Ballroom Swiss Bell Hotel Jambi
3. Pemimpin Rapat : Bapak Gubernur Jambi
4. Peserta Rapat :
1. Gubernur Jambi (Bpk. DR. H. Al Haris, S.Sos., M.H)
 2. Ketua DPRD Prov Jambi (Edi Purwanto, S.H.I, M.Si)
 3. Kapolda Jambi (Irjen Pol. Rachmad Wibowo)
 4. Dandrem 042/Gapu Brigjen TNI. Supriono. S.IP, M.M)
 5. Kejaksaan Tinggi Jambi (Dr. Bambang Gunawan,SH,M. Hum)
 6. Kabinda Jambi (Brigjen Pol. Drs. Irawan David Syah,SH. MH)
 7. Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi se-Provinsi Jambi beserta unsur Forkopimda Kab/Kota Provinsi Jambi
 8. Sekda Provinsi Jambi (H. Sudirman, SH. MH)
 9. Para Staf Anli Gubernur Jambi
 10. Ketua KPU Provinsi Jambi/mewakili
 11. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi/ mewakili
 12. Para Asisten Setda Provinsi Jambi
 13. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi
 14. Para Kaban/ Kakan Kesbang se-Provinsi Jambi
 15. Para Ketua KPU dan Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Jambi
 16. Para peserta, Undangan serta hadirin yang berbahagia

5. Agenda rapat

Rapat Koordinasi Forum Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakor Forkopimda)

Mendeteksi secara cepat potensi gangguan keamanan dan ketertiban jelang

HASIL RAPAT


1. Gubernur menyampaikan bahwa pada tahun 2024 agenda yang perlu kita siapkan bersama bagian dari upaya kita secara kolektif untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan pemilihan umum di seluruh Kabupten dan Kota se-Provinsi Jambi. Indonesia akan menyelenggarakan hajatan demokrasi yang sangat besar, yakni Pemilihan Umum, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemilihan Anggota DPRD Kabupten/Kota, Pemilihan Anggota DPRD Provinsi, Pemilihan Anggota DPR RI, dan Pemilihan Anggota DPD RI. Selama ini kita telah melaksanakan koordinasi dan persiapan sebaik mungkin untuk dilaksanakan agar terlaksananya pemilu berjalan dengan lancar, aman, demokratis, dan damai, serta dengan tingginya persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya di seluruh Kabupten dan Kota se-Provinsi Jambi.
2. Menjamin ketersediaan Anggaran, menjaga stabilitas dan menjaga netralitas, menyiapkan data kependudukan TPS harus menguasai data kependudukan TPS. Provinsi Jambi saat ini berada di posisi nomor 4 Nasional dengan wilayah rawan konflik pemilu, serta nomor 2 di Sumatra oleh karena itu harus benar-benar dipersiapkan dengan baik ujar Gubernur.
3. Harapan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi bersama Forkopimda, KPU, Bawaslu, dan semua Stakeholders (Pemangku Kepentingan) siap menyukseskan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, melalui komunikasi dan koordinasi Intens, menyiapkan anggaran Pemilu dan Pilkada, terus memonitor perkembangan semua tahapan pemilu dan pilkada, memastikan data final DPT di seluruh Kab/Kota se-Provinsi Jambi- memperkuat Netralitas ASN, Imabuan/Sosialisasi Pemilu dan Pilkada kepada masyarakat, Distribusi logistik Pemilu dan Pilkada sampai ditempat tepat waktu, pastikan terpenuhinya jumlah di TPS, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Antisipasi Potensi Konflik, Unsur Forkopimda se-Provinsi Jambi bahas Persiapan Pemilu 2024 dan Penanganan Isu-isu aktual di kabupaten/ kota, adapun tujuan rakor ini untuk mengantisipasi potensi konflik guna menyukseskan Pemilu 2024 serta percepatan penanganan konflik terutama lahan di wilayah kabupaten/ kota, khususnya Pembangunan Jalan Khusus Batu Bara juga di bahas dalam rapat ini. Ada beberapa titik lahan yang belum dibebaskan, ini masih kita upayakan untuk mendorong percepatannya, katanya. Segala upaya dilakukan agar sesuai dengan target yang sudah ditentukan sehingga dapat menyelesaikan konflik angkutan batubara yang selama ini terjadi.
5. Meningkatkan peran aktif Forkopimda melalui pertemuan rutin untuk mendeteksi secara cekat potensi gangguan keamanan dan ketertiban jelang Pemilihan Umum

6. Melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya kriminalitas dan tindakan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban jelang pemilihan umum dan pemilihan kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
7. Melibatkan elemen tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Ormas pemangku kepentingan lainnya serta forum-forum yang sudah terbentuk di daerah masing-masing untuk bersama-sama mewujudkan situasi kondusif jelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
8. Pemerintah Provinsi Jambi yakin bahwa Tni dan Polri serta Komponen Pendukung Keamanan lainnya melakukan yang terbaik demi menjaga keamanan dan Stabilitas baik sebelum pada saat maupun setelah pemilu.

II. REKOMENDASI RAPAT

1. Mengingat Pentingnya Rapat Koordinasi Forum Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakor Forkopimda) sehingga acara Rakor Forkopimda Provinsi Jambi ini perlu ditingkatkan lagi.

Jambi, Februari 2024
Notulen rapat
Kasubbid Analisa Potensi Konflik


ALFRIYANTINA, SE.
Pembina TK I
NIP: 19690127 199211 2 001



JADWAL KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
SE-PROVINSI JAMBI

BALLROOM SWISS BEL HOTEL JAMBI, RABU 20 NOVEMBER 2024

NO	WAKTU	KEGIATAN/MATERI	KETERANGAN
1.	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2.	08.00 - 09.00	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Laporan Panitia Penyelenggara 3. Sambutan dan Pembukaan Acara oleh PJs Gubernur Jambi 4. Pembacaan Doa	Protokol Drs. H. Apani Saharudin Dr.H.Sudirman. S.H.,M.H. Protokol
3.	09.00 - 12.00	Penyampaian Materi Oleh : 1. PJs Gubernur Jambi 2. Ketua DPRD Prov Jambi 3. Kapolda Jambi 4. Kajati Jambi 5. Dandrem 042/GAPU	(Moderator) Karo Pem Setda Prov Jambi 1. Dr. H. Sudirman. S.H.,M.H. 2. M.Hafiz Fattah. 3. Irjen Pol Rusdi Hartono. M.Si. 4. Dr. Hermon Dekristo.S.H.,M.H. 5. Brigjen TNI Heri Purwanto. S.E M.Sc.
4.	12.00 - 13.00	Ishoma	
	13.00 - 15.30	Paparan Masing-Masing Kabupaten/Kota. Diskusi Tanya Jawab	Bupati/Walikota Se-Provinsi Jambi
6.	16.00 -Selesai	Penutup dan Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri	Protokol

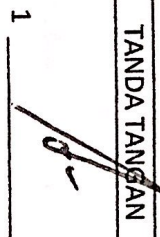


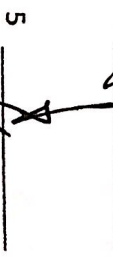

Jambi, 14 November 2024


**KEPALA BADAN KESBANGPOL
PROVINSI JAMBI**

Drs. H. APANI SAHARUDIN
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19680603 198810 1 001

DAFTAR HADIR : NARASUMBER SELAKU KETUA DAN ANGGOTA FORKOPIMDA DALAM RANGKA SINERGITAS PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DENGAN FORKOPIMDA DALAM RANGKA PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK SERTA ISU-ISU AKTUAL DI PROVINSI JAMBI

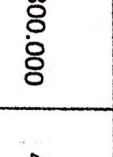


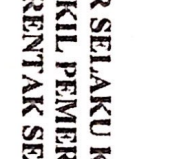

HARI : RABU
 TANGGAL : 20 NOVEMBER 2024
 TEMPAT : BALLROOM SWISS BELL HOTEL JAMBI

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Dr. H. SUDIRMAN, SH., MH	Pjs. Gubernur	
2	H. Hapis Harefaalok, SE, MAn, Wakil Ketua DPRD	Polda diwakili Dir Intelkam	
3	HENDRI HOTOBUAN Siregar, S.IP	KASATI INTEL KOREEM 042/GAPU	
4	KOLONEL INF M. IMASEY, S.E	Asisten Regasi Jambi	
5	Nopyy T. Sock Sst-Mah.		

JAMBI, NOVEMBER 2024
 A.N KEPALA BADAN
 KABID PENANGANAN KONFLIK

 H. QAWARUZ ZAMANI, SE, MM
 PEMBINA TK I
 NIP. 19720314 199903 1 005

DAFTAR : TANDA TERIMA HONORARIUM NARASUMBER SELAKU KETUA DAN ANGGOTA FORKOPIMDA DALAM RANGKA SINERGITAS PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DENGAN FORKOPIMDA DALAM RANGKA PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK SERTA ISU-ISU AKTUAL DI PROVINSI JAMBI

HARI : RABU
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2024
TEMPAT : BALLROOM SWISS BELL HOTEL JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	JAM	BESAR HONORARIUM	PPH 21 (15 %)	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Sudirman, SH., MH	Ketua Forkopimda	Pjs. Gubernur	2 jam	1.400.000	420.000	2.380.000	
2	H. Hapis Hasilillah, SE., MM	Anggota Forkopimda	Wakil Ketua DPRD	2 jam	1.400.000	420.000,-	2.380.000	
3	Hendri Hotoguan Siregar, S.IK	Anggota Forkopimda	Dir Intelkam	2 jam	1.400.000	420.000,-	2.380.000	
4	Kolonel Inf M. Imasyf, SE	Anggota Forkopimda	Kasi Intel Korem 042/Gapu	2 jam	1.400.000	420.000,-	2.380.000	
5	Nopy Tennophero South, S.H, M.H	Anggota Forkopimda	Asintel Kejari Jambi	2 jam	1.400.000	420.000,-	2.380.000	
					14.000.000	2.100.000	11.900.000	

Mengetahui :

JAMBI, NOVEMBER 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

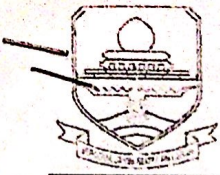
Bendahara Pengeluaran

Yang Bayar

~~H. QAMARUZ ZAMAN, SE, MM~~
~~NIP. 19720314 199903 1 005~~

~~ADE SISKA MINANGSARI, SE~~
~~NIP. 19841021 201101 2 006~~

~~H. QAMARUZ ZAMAN, SE, MM~~
~~NIP. 19720314 199903 1 005~~



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. R. M. Nur Admadibrata No. 4 Telp./ Fax (0741) 62486 - 62322

NOTULEN RAPAT

**RAPAT FORKOPIMDA SE-PROVINSI JAMBI DALAM RANGKA
PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK SERTA ISU-
ISU AKTUAL DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2024**

**TEMPAT: BALLROOM SWISS BELL HOTEL JAMBI
RABU, 20 NOPEMBER 2024**

I. IDENTITAS RAPAT :

1. Dasar : Surat Persetujuan Gubernur Jambi pada Nota dinas nomor 47/bakesbangpol-5.1/II/2024 tanggal 07 Februari 2024 tentang Persetujuan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jambi. Tentang Rakor Forkopimda dalam Rangka Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak serta isi-isu aktual di Provinsi Jambi Tahun 2024, Guna Mensukseskan Pemilu 2024.
2. Waktu/ Tempat : Rabu, 20 Nopember 2024/ Ballroom Swiss Bell Hotel Jambi
3. Pemimpin Rapat : Pjs. Bapak Gubernur Jambi
4. Peserta Rapat :
 1. Pjs. Gubernur Jambi (Bpk. Dr.H. Sudirman, S.H , M.H)
 2. Ketua DPRD Prov Jambi/diwakili oleh Waka III (H.Hapis.Hasbiallah, S,E. M.M).
 3. Kapolda Jambi/ diwakili Dir.Intelkam (Hendri Hotoguan Siregar. SIK)
 4. Dandrem 042/Gapu diwakili Kasi Intel (Kolonel Inf. M.Imasfy, SE).
 5. Kejaksaan Tinggi Jambi/diwaikili Asintel (Nopy Tennophero Suoth, S.H, M.H).
 6. Kabinda Jambi (Brigjen Pol. Drs. Irawan David Syah,SH. MH)
 7. Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi se-Provinsi Jambi beserta unsur Forkopimda Kab/Kota Provinsi Jambi
 8. Para Staf Ahli Gubernur Jambi
 9. Ketua KPU Provinsi Jambi/mewakili
 10. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi/ mewakili
 11. Para Asisten Setda Provinsi Jambi
 12. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi
 13. Para Kaban/ Kakan Kesbang se-Provinsi Jambi
 14. Para Ketua KPU dan Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Jambi
 15. Para peserta, Undangan serta hadirin yang berbahagia

Agenda rapat

Rapat Koordinasi Forum Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakor Forkopimda) Mendeteksi secara cepat potensi gangguan keamanan dan ketertiban jelang pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah serentak serta Penanganan isu-isu aktual Provinsi Jambi Tahun 2024.

HASIL RAPAT

1. Gubernur menyampaikan bahwa pada tahun 2024 Rakor Forkopimda ini merupakan upaya untuk menciptakan kerjasama dan sinergitas atas Pemerintah Daerah, TNI dan Polri menciptakan kerjasama dan sinergitas atas semua unsur elemen lapisan masyarakat guna dalam mengatasi kendala atau hambatan, pada pelaksanaan pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 27 Nopember 2024 mendatang agar dapat berjalan sesuai harapan bersama yaitu terwujudnya pilkada yang aman, damai, kondusif dan sukses, Pjs Gubernur Jambi mengajak Forkopimda dan semua komponen yang berada di Provinsi Jambi bersinergi dan berkoordinasi dan menyiapkan dan meyukseskan pilkada serentak 2024, Gubernur berharap sinergitas dan kolaborasi dapat terus dijaga dan ditingkatkan, ini sebagai upaya bentuk kerjasama dan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan TNI/Polri dalam mengambil sikap dan indikator utama keberhasilan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak nanti.
2. Polda Jambi, agar tidak terjadi konflik sosial/kerusuhan masyarakat jelang pilkada serentak, kita sudah mengantisipasi dengan langkah-langkah sbb :
 - Telah dibuat IPKP untuk memetakan kerawanan wilayah yang berpotensi konflik /kerusuhan massal.
 - Pelaksanaan Ops Pra OMP untuk ciptakan kondisi situasi Kamtibmas.
 - Pelaksanaan cooling system oleh seluruh polda jajaran hingga ketingkat polsek.
 - Pelaksanaan OMP tahun 2024.
 - Kesiapan stakeholders terkait (BIN,TNI,dan Pemda), pemberdayaan masyarakat dalam mereduksi potensi konflik sosial & penanganannya (jika terjadi). Peran/partisipasi aktor lokal dalam pencegahan konflik yaitu, kolaborasi sinergitas pemerintah Daerah dan instansi vertikal setempat, lembaga pendidikan, Organisasi masyarakat sipil, tomas, toga, komunitas dan kelompok lingkungan dan partai politik.

3. Danrem 042/Gapu (Kasim Intel Korem) :

- Jaga Netralitas aparaturnegara : seluruh ASN, TNI dan Polri untuk tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis.
- Tingkatkan keamanan dan ketertiban, Koordinasi Forkopimda di daerah untuk menjaga situasi tetap kondusif selama minggu tenang dan hari pemungutan suara.
- Awasi kampanye terselubung, bawaslu bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran, termasuk kampanye terselubung, politik uang atau penyebaran hoaks yang merusak proses demokrasi.
- Jamin logistik pemilu, pastikan distribusi logistik pemilu, seperti surat suara, tinta dan alat pelindung lainnya, sampai keseluruhan TPS tepat waktu dan dalam kondisi baik.
- Kuatkan sosialisasi untuk partisipasi pemilih.
- Jaga kearifan lokal dan harmoni sosial.
- Tingkatkan kesiapan dalam keadaan darurat.
- Mengutamakan kejujuran dan keadilan.
- Pengawasan pasca pemilu, pastikan proses penghitungan suara berlangsung.
- Evaluasi berkala dan laporan langsung.
- Kekompakan dan sinergitas Forkopimda.

4. DPRD Provinsi Jambi/diwakili oleh Waka III/ H. Hasibillah, S.E. , M.M) :

Indikator Keberhasilan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 :

- Berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku.
- Tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama konflik kekerasan.
- Pemerintahan yang ada tetap berjalan lancar baik di Pusat maupun di daerah.

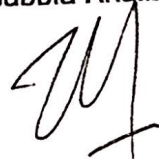
5. Strategi membangun sinergi elemen pendukung keberhasilan :

- Penyelenggara KPU
- Pengawas (Bawaslu, DKPP Lembaga non Bawaslu).
- Pemerintah Pusat dan Daerah Aparat Keamanan (TNI/POLRI, SATPOL PP, SATLINMAS)
- Parpol dan paslon
- Media / Pers.
- Masyarakat.

II. REKOMENDASI RAPAT

1. Kegiatan ini dalam rangka dalam rangka persiapan pemilihan Kepala Daerah serentak serta isu-isu aktual di Provinsi Jambi tahun 2024, berjalan aman, damai dan kondusif.
2. Dalam kegiatan ini memberikan gambaran atas tahapan pilkada serentak oleh penyelenggara pilkada yang telah dilakukan untuk menyukseskan Pilkada serentak 2024, Meningkatkan partisipasi politik oleh masyarakat dalam mendukung dan mensukseskan agenda nasional pilkada, meningkatkan stabilitas politik dan daerah baik sebelum. Maupun setelah pelaksanaan, menyamakan persepsi oleh semua stakeholder terkait pelaksanaan pilkada serentak 2024.

Jambi, Nopember 2024
Notulen rapat
Kasubbid Analisa Potensi Konflik



ALFRIYANTINA, SE.
Penata TK I
NIP: 19690127 199211 2 001

No	Files	Tanggal	Oleh	Aksi
1	PERSYARATAN ORMAS	23/07/2025	kesbangpol	DOWNLOAD
2	ISIAN FORMULIR DATA ORMAS	23/07/2025	kesbangpol	DOWNLOAD
3	Permendagri 57 Tahun 2017	23/07/2025	kesbangpol	DOWNLOAD

Search Keyword

[SEARCH](#)

**LAPORAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL BERKAITAN DENGAN SUMBER DAYA ALAM
OLEH TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK DI PROVINSI JAMBI**

Tahun 2025

1. KABUPATEN BATANGHARI

NO	DASAR	IDENTIFIKASI MASALAH	WILAYAH	LANGKAH YANG DILAKUKAN	JADWAL MEDIASI/PENINJAUAN LOKASI	KEPUTUSAN TIM TERPADU	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Kelompok Yang Mengatasnamakan Warga Desa Bungku Dipimpin Rasto Dan Kusnen Menduduki Lahan Plasma Skema 2.000 Ha Divisi Mentilingan Sebanyak 183 Kk • Meminta Kepada Pemkab Batanghari Untuk Segera Melakukan Revisi Terhadap Sk Nomor 180 Tahun 2014 Tentang Penempatan 17 Rumpun Keturunan Suku Anak Dalam (SAD) Desa Bungku Dilahan Plasma Skema 2000 Ha PT.BSU Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari. 	Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Mediasi antara anggota Timdu dengan Rasto Cs 2. Peninjauan Lapangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 Januari 2024 2. 10 Januari 2024 3. 12 Januari 2024 (Peninjauan Lokasi) 	Dari dokumen yang diserahkan maka Tim Terpadu Kabupaten Batanghari dapat memberikan pandangan bahwa Kelompok Rasto merupakan kelompok yang pernah mengajukan penyelesaian klaim lahan pada PT. Asiatic Persada di mulai Tahun 2004 yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya	Masih dalam proses penyelesaian

2.	Surat dan Kecamatan Mersam Nomor 05/156/Pe m/202 4 Tanggal 14 Maret 2024 hal mohon penyelesaian batas tanah masyarakat dengan PT. WKS	<ul style="list-style-type: none"> • Ada oknum dari PT. WKS yang bernama bayu eka saputra dari Distrik IV datang menemui saya pada hari senin tanggal 12 februari 2024 jam 11.00 wib kedatangannya bertujuan akan mengeksekusi tanaman sawit sekaligus pondok tetapi beliau tidak membawa surat perintah. • Jumat tanggal 16 februari 2024 saya mengajukan pengaduan ke camat mersam yaitu mohon dimediasi antara kedua belah pihak selanjutnya akan dimediasi pada hari selasa tanggal 20 februari 2024 tetapi saudara bayu berhalangan. pada tanggal 26 februari 2024 saya didatangi kembali oleh oknum yang bernama andre meminta untuk tidak menanam kelapa sawit. dan saya iyaikan. selanjutnya tanggal 1 maret 2024 saya tidak dilokasi terjadilah pengrusakan pondok, dari maka dari itulah kami datang untuk minta penyelesaian. 	Kecamatan Mersam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Rapat antara anggota Timdu dengan A. wahab Cs 2. Timdu akan meneliti dan memverifikasi data A.Wahab 3. Memanggil PT. WKS untuk meminta keterangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 20 Maret 2024 2. 25 Maret 2024 	Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari akan memanggil kembali PT. WKS dan diharapkan dapat membawa dokumen pendukung	Masih dalam proses penyelesaian
3.	Surat Kepala Desa Jebak	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kegiatan penambangan minyak illegal 	Desa Jebak Kec. Muara	1. Rapat Internal Anggota Tim	1. 21 Maret 2024	1. Pemerintah daerah Kabupaten Batanghari	selesai

	<p>Nomor : 140/059/Se kr Tanggal 23 Januari 2024 Perihal Laporan Illegal Driling</p>	<p>di RT. 11 Dusun 3 Senami dalam kawasan Tahura</p> <ul style="list-style-type: none"> Dampak yang ditimbulkan Sungai Tercemar, insiden konflik antar warga dan isu Kepala Desa menerima fee dari kegiatan tersebut 	<p>Tembesi Kab. Batanghari</p>	<p>Terpadu</p>		<p>didukung instansi terkait akan melaksanakan pemberantasan terhadap kegiatan Illegal Drilling di Kawasan Hutan Tahura Senami.</p> <p>2. Bahwa Tim Terpadu berkomitmen tidak ada lagi aktivitas Illegal Drilling di Hutan Tahura</p> <p>3. Akan dibentuk tim pemberantasan Illegal Drilling yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Bakesbangpol Kabupaten Batanghari Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari Kejaksaan Batanghari TNI Polri Bpbd Kabupaten Batanghari Pol PP Kabupaten Batanghari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batanghari ATR/BPN 	
--	--	---	--	----------------	--	--	--

						Kabupaten Batanghari	
--	--	--	--	--	--	-------------------------	--

- KPHP Kabupaten
Batanghari

						<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Batin XXIV • Kecamatan Tembesi • Aparat Desa Bulian Baru • Aparat Desa Jebak 	
4.	<p>Surat pengaduan masyarakat tanggal 7 Maret 2024 perihal mohon bantuan fasilitasi penyelesaian konflik kelompok masyarakat yang masih berkonflik dengan PT. Berkat Sawit Utama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ada 11 kelompok SAD sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok mahadi Kulok, 2. Maliki, 3. Jais, 4. Ahmad Nuri/Marsal, 5. 525, 6. 258, 7. Muslim, 8. Ruslan 9. Solihin 10. Sulardi 11. Tani Persada <p>Menyampaikan pengaduan mohon bantuan fasilitasi ke Timdu yang isinya : Sejak Tahun 2013 kami juga berjuang dengan pok 113 yang menuntut lahan seluas 3.550 Ha hasil surve mikro Tahun 1987. Pada Bulan Desember Tahun 2022 Perusahaan, Pemerintah Daerah, kakanta BPN Batanghari, Kakanwil BPN Jambi dan Kementerian ATR/BPN RI sudah menyelesaikan konflik pok masyarakat 113 dengan menyerahkan lahan seluas 770 Ha untuk 744 kk, sementara konflik kami sampai saat ini belum diselesaikan dan belum direspon.</p>	Desa Bungku Kecamatan Bajubang	Rapat Internal Anggota Tim Terpadu dengan Penguasa wilayah setempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. 26 Maret 2024 2. 19 September 2024 3. 17 Desember 2024 4. 1 Oktober 2024 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa disepakati dalam konflik yang melibatkan 11 kelompok yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Mahadi Kulok (SAD) seluas ± 311 ha 2. Kelompok Maliki (SAD) seluas ±156 ha 3. Kelompok Jais (SAD) seluas ± 39 ha 4. Kelompok Amad Nuri.cs dan Marsal (SAD) seluas ± 182 ha 5. Kelompok 525 (SAD dan petani) seluas ± 525 ha 6. Kelompok 258 (sad) seluas ± 258 ha 7. Kelompok Muslim (sad) seluas ± 49 ha 8. Kelompok Ruslan.Mt (SAD) seluas ± 31,56 9. Kelompok Solikhin (petani) seluas ± 42 ha 10. Kelompok Sulardi (petani) seluas ± 39 ha 11. Kelompok Tani Persada (SAD dan petani) seluas 	Masih dalam proses penyelesaian

					<p>± 600 ha</p> <p>Dengan PT. BSU adalah diluar dari penyelesaian yang telah diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Keputusan Bupati Batanghari Nomor 180 Tahun 2014 tentang penetapan nama-nama serta peta lokasi warga Suku Anak Dalam(SAD) penerima lahan kompensasi seluas ± 2000 Ha dari PT. Asiatic Persada di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari</p> <p>2. Bahwa agar kelompok melalui pendamping untuk menyampaikan dokumen dan matrik perkembangan permasalahan yang memuat (nama kelompok, klaim, tahapan penyelesaian).</p> <p>3. Agar dokumen sebagaimana pada poin 2 disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena dokumen dimaksud akan dijadikan bahan oleh tim terpadu untuk mengagendakan langkah penyelesaian selanjutnya.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						Bahwa Tim Terpadu akan melakukan pengecekan objek di lapangan.	
--	--	--	--	--	--	--	--

5.	hasil investigasi lapangan anggota Tim Terpadu Kabupaten Batanghari terkait peruntukan lahan FASUM (fasilitas umum) sesuai dengan SK 180 Tahun 2014 yang tidak sesuai peruntukannya	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2014 PT Berkah Sawit Utama yang dahulu bernama PT Asiatic Persada telah melepaskan lahan seluas 2.000 Ha kepada Warga SAD Desa Bungku Kec Bajubang Kab Batanghari untuk menyelesaikan konflik lahan dengan diterbitkan SK Bupati Batanghari Nomor 180 Tahun 2014 untuk menetapkan nama nama serta peta lokasi warga SAD penerima lahan kompensasi seluas 2 000 Ha dari PT PT BSU/ Astatic Persada dengan dasar rumpun keturunan nenek puyang delapan • Terhadap areal lahan skema 2.000 Ha diberikan juga lokasi lahan fasilitas umum (fasum) seluas 24 Ha yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh seluruh rumpun keturunan nenek empat puyang delapan sebagai sarana dan prasarana umum, namun fakta dilapangan penggunaan dan penguasaannya saat ini dikuasai oleh masyarakat luar SAD yang tidak masuk dalam SK 180 	Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari	Rapat anggota Tim Terpadu dengan anggota Koperasi Berkah Bersatu dan Tuah Bersatu	1. 22 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak Koperasi Berkah Bersatu dan Tuah Bersatu sepakat agar lahan fasum yang ada dibagi menjadi 2 (dua) belahan untuk Koperasi Berkah Bersatu dan Tuah Bersatu. • Adapun luasan lahan akan disesuaikan dengan banyaknya rumpun pada dua Koperasi dengan perhitungan luas Fasum : 17 rumpun hasilnya dikali 11 pada Koperasi Berkah Bersatu dan kali 6 pada Koperasi Tuah Bersatu 	Masih dalam proses penyelesaian
6.	Surat dari Kepala Desa Mersam Nomor : 220/Mrs/V /2024	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pengaduan dari Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi bahwa Adanya dugaan upaya untuk 	Kecamatan Mersam dan Kecamatan	1. Rapat anggota Tim Terpadu dengan aparat Desa Mersam	1. 22 Mei 2024 2. 27 Mei 2024 3. 10 Juli 2024 4. 21 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap hasil identifikasi dilapangan oleh Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari yang 	selesai

<p>Tanggal 20 Mei 2024</p> <p>Perihal Permohonan Fasilitasi Mediasi Terkait Tapal Batas Antara Desa Mersam Kecamatan Mersam dan Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi</p>	<p>penguasaan lahan yang berada di wilayah hukum Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari oleh pihak luar Desa Pulau diwilayah perbatasan dengan Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Peta Desa yang dimiliki dan dengan keterangan dua-tuo kampung berdasarkan dokumen tersebut dilapangan ditemukan dugaan kegiatan penguasaan lahan diwilayah Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi oleh oknum yang berada dari Desa Mersam Kecamatan Mersam dengan alasan masih berada didalam Peta Desa yang dimiliki. Adanya Pengaduan dari Desa Mersam Kecamatan Mersam menyatakan bahwa Desa Pulau telah mengklaim wilayah dan membuat parit Tapal Batas Desa tanpa persetujuan Kepala Desa Mersam 		<p>Kecamatan Mersam</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat anggota Tim Terpadu dengan aparat Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Peninjauan Lokasi 	<p>5. 18 September 2024</p>	<p>mengacu pada batas administrasi wilayah Kecamatan antara Kecamatan Mersam dan Kecamatan Muara Tembesi yang bersumber dari badan Informasi Geospasial (BIG) dan peta administrasi RTRW sesuai dengan Perda Nomor 16 tahun 2013 Kabupaten Batanghari</p> <ul style="list-style-type: none"> Kepada Kepala Desa dalam menandatangani dokumen kepemilikan wajib mengacu pada batas adminitrasi yang sudah ditetapkan Jika ada pihak yang keberatan terhadap batas wilayah administrasi yang sudah ada disilahkan menempuh jalur hukum 	
--	---	--	---	-----------------------------	--	--

7.	PT. Pratama agro sawit pada tanggal 7 juni 2024 menyurati Tim Terpadu perihal permohonan bantuan mediasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tanggal 5 Juni 2024 diadakan pertemuan antara Petani Mitra dengan Manajemen PT. Pratama Agro Sawit dikarenakan terdapat penurunan hasil yang signifikan, masyarakat mempertanyakan mengapa 	Kecamatan Batin XXIV	Rapat anggota Tim Terpadu dengan Manajemen PT. PAS dan Petani Mitra	1. 24 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak Perusahaan berkomitmen untuk memperbaiki Infrastruktur : Jalan, Titian Panen, Gorong-Gorong dan Pasar Pikul mulai tanggal 1 juli 2024. • Untuk Tahun Tanam 2018 	selesai
	pertemuan antara manajemen PT. Pratama Agro Sawit dengan petani mitra	<p>adanya penurunan dan masyarakat menuntut untuk menunda pembayaran yaitu refit sebesar 30% sampai hasil maksimal. Besaran refit ini tertuang didalam MOU dengan perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemudian petani meminta penjelasan hutang tahun tanam 2011 sampai 2016. • Dikarenakan infrastruktur (Jalan, Titian Panen, Gorong-gorong dan Pasar Pikul) hancur tidak ada perbaikan, maka petani menuntut cicilan hutang ini ditiadakan selagi belum diperbaiki, hal ini tertuang didalam kesepakatan pada Tahun 2021 jika tidak ada pembangunan infrastruktur maka petani menyatakan tidak setuju pemotongan uang refit sebesar 30% 				<p>dan 2019 akan segera dilakukan penilaian kelayakan oleh Disbun untuk penentuan bagi hasil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Terpadu Kabupaten Batanghari akan melakukan pengawasan di lapangan 	

8.	Surat Kemenkumham Wilayah Jambi Nomor : w.s-ha.01.02.6 Tanggal 20 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> Adanya surat dari Lembaga Hukum selaku Kuasa Ketua Kelompok Tani Jaya Bersama Tanggal 31 Mei 2024 perihal Pengaduan dan Mohon tindak lanjut tentang objek tanah milik Kelompok Tani Jaya Bersama yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Jambi, maka dari itu Kemenkumham Wilayah Jambi menyurati Tim Terpadu Kabupaten Batanghari agar melakukan 	Desa Simpan g Rantau Gedan g Kecamatan Mersa m	Rapat anggota Tim Terpadu	1. 8 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> Tim Terpadu Akan Menyurati Pengadilan Negeri Muara Bulian Guna Meminta Putusan Pengadilan Nomor : 145/PID.B/2018/PN.MBN Tanggal 28 Januari 2019, Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 28/PID.B/2021/PN.MBN, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 64/PID/2021/PT.JMB Tanggal 30 JUNI 2021, Permohonan Kasasi Nomor 	Masih dalam Proses penyelesaian
		koordinasi, konsultasi dan klarifikasi laporan dugaan permasalahan HAM				<p>1049.K/PD/2021 Tanggal 28 September 2021, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1883.K/PID.SUS-LH/2021 JO. NOMOR : 173/ PID.SUS-LH/ PT.JMBO.82/ PID.SUS/2021/PN.MBN</p> <ul style="list-style-type: none"> terkait permasalahan ini Akan disiapkan draft surat jawaban kepada Kemenkumham dan akan dibahas draft tersebut pada rapat selanjutnya untuk membahas poin-poinnya 	

9.	Surat Lembaga Adat Kabupaten Batanghari Nomor 040/LAD.B SBR-BTH/VI/2024 Tanggal 19 Juni 2024 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Tanah	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa sudah dilaksanakan rapat sidang sengketa lahan sialang pungguk pada tanggal 11 Juni 2024 yang menyatakan ada 50 H lahan yang belum dikelola infonya sudah terjadi tumpang tindih jual beli. Lembaga adat sudah melaksanakan tahapan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang diadukan tetapi ada beberapa kendala sehingga memohon bantuan kepada Tim Terpadu untuk memfasilitasi permasalahan tersebut. 	Desa Muaro Singoan Kecamatan Muara Bulian	Rapat anggota Tim Terpadu dengan Lembaga Adat Kabupaten Batanghari	1. 9 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> Diminta kepada Lembaga Adat untuk menyerahkan data yang disampaikan oleh pelapor kepada Tim Terpadu Kabupaten Batanghari. 	<ul style="list-style-type: none"> Masih dalam proses penyelesaian
10.	Surat Kelompok Tani SPSI Nomor : 01/SPSI-SRV/2024 Tanggal 21 Mei 2024 perihal	<ul style="list-style-type: none"> Dalam Surat Kelompok Tani mereka memohon untuk memfasilitasi penyelesaian dengan pihak Perusahaan dalam penyampaian nya dasar mereka mengklaim adalah izin Tahun 1996 yaitu 	Kecamatan Mersam	Rapat anggota Tim Terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 19 Juli 2024 24 Juli 2024 29 Juli 2024 15 Agustus 2024 	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa PT.VAT menjawab secara tertulis dengan surat Nomor : 009/VAT/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal tanggapan berita acara penyelesaian konflik terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Selesai

	permohonan penyelesaian sengketa tanah	izin membuka lahan pertanian, pada tahun 2010 PT. VAT mendapatkan izin lokasi tidak ada tumpang tindih dengan pihak lainnya.				<p>sengketa tanah antara kelompok tani spsi dengan PT. VAT</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan surat dari PT.VAT, apabila kelompok tani merasa jawaban dari pihak PT. VAT tidak sesuai maka agar pihak kelompok tani spsi untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku 	
11.	Surat dari ahli waris prabu tanggal 25 Juni 2024 perihal permintaan penyelesaian permasalahan surat pernyataan Kades Lubuk Ruso terkait pembatalan sporadik yang sudah dikeluarkan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya surat pernyataan Kades Lubuk Ruso terkait pembatalan sporadik yang sudah dikeluarkan, sedangkan sudah ada putusan Timdu sebelumnya 	Kecamatan Pematang	Rapat anggota Tim Terpadu dengan pihak pelapor dan terlapor	1. 30 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kades Lubuk Ruso nomor : 70/LR/VIII/2024 akan dicabut kembali / dinyatakan tidak berlaku dalam proses administrasi apapun Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Ahli Waris Pangeran Prabu dapat diajukan penyelesaiannya melalui Tim Terpadu Kabupaten Batanghari dengan bukti dan legalitas 	selesai

						yang lengkap.	
12.	Surat dari H. Rd. M. Taher ke Tim Terpadu Kabupaten Batanghari Tanggal 2 Agustus 2024.	<ul style="list-style-type: none"> Pihak H. Rd. M. Taher protes terhadap Tim Terpadu atas mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024 dengan agenda acara rapat penyelesaian permasalahan antara Ahli Waris Prabu dengan Kades Lubuk Ruso. 	Kecamatan Pelayung	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Internal anggota Tim Terpadu Rapat mediasi antara anggota Tim Terpadu dengan pihak pelapor dan terlapor 	<ol style="list-style-type: none"> 14 Agustus 2024 28 Agustus 2024 25 September 2024 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Yusna Dewi (Ahli Waris Prabu) Tidak Mau Dilakukan Mediasi Dan Memilih Untuk Menempuh Jalur Hukum 	Selesai
13.	Surat Kelompok Tani Berkah	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan ini dikarenakan anggota 	Kecamatan Bajubang	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Internal anggota Tim 	<ul style="list-style-type: none"> 19 Agustus 2024 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Disdagkop UMKM bersama Timdu akan 	Masih dalam proses

	<p>Bersatu/Rumpun SAD/mewakili tanggal 19 Juli 2024</p>	<p>Koperasi Berkah Bersatu tidak memiliki kepengurusan koperasi sejak Tahun 2023 SK Kepengurusan Koperasi Berkah Bersatu sudah habis masa berlakunya, lahan koperasi berkah bersatu menjadi lahan bebas dan masuknya orang-orang luar dengan cara menyewa, membeli dan menguasai langsung dari orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk hal itu koperasi berkah Bersatu akan membentuk Kepengurusan Koperasi agar menyelamatkan aset Koperasi Berkah Bersatu. Koperasi Berkah Bersatu meminta Kepada Timdu untuk mendukung keputusan rapat tokoh-tokoh SAD yang sudah membantu membentuk Kepengurusan Koperasi.</p>		<p>Terpadu 2. Rapat mediasi antara anggota Tim Terpadu dengan pihak pelapor dan terlapor</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 17 Oktober 2024 • 3 September 2024 • 11 Desember 2024 	<p>melakukan pembinaan dan penguatan terhadap kepengurusan Koperasi Berkah Bersatu yang telah dibentuk dengan ketua saudara Sukiwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurus Koperasi Berkah Bersatu dengan ketua saudara Sukiwa wajib melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama menjalankan kepengurusannya yang akan dilaksanakan setiap awal tahun (dimulai januari 2025) • Kepada Koperasi Berkah Bersatu agar mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan akan di awasi oleh Timdu 	<p>penyelesaian</p>
--	---	--	--	--	---	---	---------------------

14.	Surat dari perwakilan masyarakat Desa Pompa Air Tanggal 24 September 2024 tentang mohon bantuan mediasi penyelesaian konflik masyarakat Desa Pompa Air dengan saudara Huseng (Pengusaha)	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat Desa Pompa air menuntut ± 200 Ha lahan. Sekira Tahun 2020 lahan garapan masyarakat baik yang sudah ditanam kelapa sawit maupun yang belum tanpa sepengetahuan digusur oleh pihak Huseng dengan menggunakan alat berat lalu ditanami kelapa sawit oleh pihak Huseng. 	Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang	1. Rapat mediasi antara anggota Tim Terpadu dengan pihak pelapor dan terlapor	<ul style="list-style-type: none"> 9 Oktober 2024 15 Oktober 2024. 	<ul style="list-style-type: none"> Kepada Pihak Huseng diharapkan dapat menyerahkan dokumen kepada Tim Terpadu melalui Sekretariat Tim Terpadu Badan Kesbangpol Kabupaten Batanghari 	Masih dalam proses penyelesaian
15.	Surat Kelompok	<ul style="list-style-type: none"> Tumpang Tindih Lahan 	Kecamatan	1. Rapat mediasi	<ul style="list-style-type: none"> 24 september 	<ul style="list-style-type: none"> Tim Terpadu Meminta 	Masih dalam

	<p>Tani Sabar Menanti Desa Olak Kecamatan Muara Bulian Nomor: 02/Ktsm/Do/Viii/ 2024 Tanggal 13 Agustus 2024 Perihal Permohonan Penyelesaian Lokasi PT. IKU Tumpang Tindih Dengan Lokasi Kelompok Tani Sabar Menanti Desa Olak Dan Desa Muara Singoan</p>	<p>Kelompok Tani Sabar Menanti Adalah Dengan PT. IKU. Lahan Kelompok Tani Ini Sudah Ada Sejak 2010, Luasan Nya 48,6 Ha Terus Menggusur Dengan Penanaman Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> Lahan Kelompok Tani Sabar Menanti Seluas 500 Ha Yang Ditanami Oleh PT.WKS Dengan Tanaman Akasia Dari Tahun 1996 Penyerahan Tahun 1999. Anggota Kelompok Tani Berjumlah 185 Orang. Masyarakat Bekerja Sama Dengan PT. VAS Pada Tahun 2013 Dan Dikerjakan 200 Ha Ssertelah Di Teras Sudah Mereka Mundur Karena Lahan Tersebut Masuk Dalam Hp. Kemudian Lahan Tidak Dikelola. Lalu Pada Tahun 2017 Kelompok Tani Mau Kerja Sama Dengan PT. WKS Dan Kami Membentuk Koperasi Sabar Menanti. Kemudian Mundur Dan Lahan Didiamkan Mulai Dari 2018. Lahan Tersebut Hingga Saat Ini Masih Ada Namun Tidak Utuh Lagi 	<p>Muara Bulian</p>	<p>antara anggota Tim Terpadu dengan pihak pelapor</p>	<p>2024</p>	<p>Kepada Kelompok Tani Sabar Menanti Untuk Menyiapkan Dokumen Alas Hak Kepemilikan Lahan Kelompok Tani Yang Terdiri Atas 185 Orang Anggota Dan Diserahkan Ke Tim Terpadu Kabupaten Batang Hari</p> <ul style="list-style-type: none"> Selanjutnya Kelompok Tani Untuk Mengupayakan Dari Jumlah Luas Yang Masuk Kedalam Izin Pt. Iku Dengan Nyebutkan Nama Kelompok Tani Yang Lahannya Masuk Kedalam Izin Pt. Iku Dan Menyebutkan Lahan Siapa Saja Dari Kelompok Tani Yang Masuk Kedalam Izin Pt. Iku 	<p>proses penyelesaian</p>
16.	<p>Surat dari Perwakilan Kelompok Tani Mayang Mangu rai</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dalam proses beberapa kali rapat telah disepakati dari 46 H masih tersisa 18 H dan sudah dilakukan kompensasi pada akhir Tahun 2022. 	<p>Kecamatan Mersam</p>	<p>1. Rapat mediasi antara anggota Tim Terpadu dengan pihak pelapor</p>	<ul style="list-style-type: none"> 4 November 2024 	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa penyelesaian ini tidak masuk kedalam penyelesaian 18 H yang telah diselesaikan oleh PT.SJL Baru. 	<p>Masih dalam proses penyelesaian</p>

	tentang						
	Permohonan Tindak Lanjutan Mediasi Konflik Lahan antara Kelompok Tani Mayang Mangurai Dan PT.SJL	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota kelompok tani ini berjumlah lebih kurang 36 orang. • Pada 11 september 1996 Pemerintah Kabupaten Batanghari <p>perma h menyurati PT.SJL dengan Nomor 016/SJL/D/IX/1996 perihal pengembalian lahan yang tidak digarap oleh PT.SJL</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok Tani Mayang Mangurai diberikan kesempatan jika masih ada data yang ingin disampaikan. • Kepada PT.SJLP untuk menyampaikan kronologis dan data terhadap permasalahan konflik dengan Kelompok Tani Mayang Mangurai. 	

17.	Surat Kelompok Tani Maju Bersama Nomor : 07/KTMB/2024 Tanggal 25 November 2024 Perihal Permohonan Kemitraan Kehutanan Sudah Koordinasi Dengan Pihak Kehutanan PT. REKI Lutfi Di Bungku (Kantor)	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok Tani Maju Bersama Ini Ada Sejak Tahun 2018 Posisi Lahan Dibatanghari Mak a Dilegalkan Di Kabupaten Batanghari Yang Berada Didalam Konsesi Pt. Reki. Di Dishut Sudah Dibahas Dulu PT. Sungai Bahar Pasifik Dan Ada Regulasi Nya. Regulasinya Yaitu Kemitraan Kehutanan Dari Dinas Kehutanan Provinsi. • Menurut Dinas Kehutanan Solusi Nya Boleh Bermitra Dan Permasalahan Ini Sudah Final. Luas Lahan Sawit Yang Masuk Dalam Wilayah Konsesi Pt. Reki Seluas ± 350 Ha Dan 50 Ha Apl Batanghari Muaro Jambi • Setelah Dilihat PT. REKI Dokumen Dari Kelompok Tani Maju Bersama 10 % Bukan Berdomisi li Dibatanghari 	Kecamatan Bajubang	1. Rapat mediasi antara anggota Tim Terpadu dengan pihak pelapor	• 12 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari Akan Mengagendakan Rapat Kembali Dan Akan Mengundang Pihak KPHP, Pt. Sungai Bahar Pasifik Utama Dan Kelompok Tani Maju Bersama (KTMB) • Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari akan mengagendakan kembali dan akan mengundang Sdr. Sumarto, Alatas, Sartono, Darmanto, Kelompok Tani Maju Bersama untuk dimintai keterangan. • Kepada kelompok tani maju bersama harap untuk melengkapi data 	Masih dalam proses penyelesaian
-----	---	---	--------------------	--	--------------------	---	---------------------------------

<p>18. Surat Kelompok Tani Jaya Bersama Tanggal 5 Agustus 2024 Terkait Pengaduan Dan Mohon Tindak Lanjut Terhadap Objek/Atau Lahan Milik Kelompok Tani Jaya Bersama Desa Simpang Rantau Gedang Kec. Mersam Kab. Batang Hari An. Suanto Bin Legimin Dkk</p>	<ul style="list-style-type: none"> Terhadap Objek/Atau Lahan Milik Kelompok Tani Jaya Bersama Desa Simpang Rantau Gedang Kec. Mersam Kab. Batang Hari An. Suanto Bin Legimin Dkk, Yang Mana Objek Atau Lahan Tersebut Telah Dijual Oleh Pejabat, Kepala Desa Simpang Rantau Gedang (Tarmizi. Ab) Dan Pemda Kab. Batanghari (Pt. Aministrasi Umum/Kakan. Kesbangpol An. Farizal,S.H.M.H) 	<p>Desa Simpang Rantau Gedang</p>	<p>1. Rapat mediasi antara anggota Tim Terpadu dengan pihak pelapor</p>	<ul style="list-style-type: none"> 12 Desember 2024 	<ul style="list-style-type: none"> Tim Terpadu Kabupaten Batanghari akan meneliti dokumen yang disampaikan dan akan mengagendakan rapat internal dengan anggota Tim Terpadu. Tim Terpadu Batanghari selanjutnya akan mengagendakan rapat dengan mengundang PT. VAT, SJL Plasma, dan pihak-pihak terkait 	<p>Masih dalam proses penyelesaian</p>
--	--	-----------------------------------	---	--	---	--

19.	Surat Desa Simpang Rantau Gedang Nomor : 140/0624/PEM/S RG/XI/2024 Tanggal 27 September 2024 Hal Permohonan Fasilitas Terkait	<ul style="list-style-type: none"> TKD Yang Terletak Di Desa Padang Kelapo Ini Sudah Memiliki SHM Tahun 1991 Seluas 77.174 M Namun Dikarenakan Adanya Peralihan Pimpinan Dan Faktor Lainnya Sehingga Tanah Ini Berkurang Menjadi 3,2 Ha, Tanah Ini Berbatasan Dengan PT. PMB, PT. Mekar Agro Sawit Dan PT. APL 	Desa Simpan g Rantau Gedan g Kecamatan Mersa m	1. Rapat mediasi antara anggota Tim Terpadu dengan pihak pelapor	<ul style="list-style-type: none"> 13 Desember 2024 	<ul style="list-style-type: none"> Diharapkan Melengkapi Dokumen Terkait Kronologis Tanah Kas Desa Ini. Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari Selanjutnya Mulyo (Palmo Lestari). 	Masih dalam proses penyelesaian
20.	Menindaklanjuti Surat Surat Kelompok Tani Teratai Maju Tanggal 25 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> Pemda yang Menerima salinan keputusan tersebut terhitung Tahun 2011 sampai Tahun 2024 (13 Tahun) namun belum 	Kelu rahan Tera tai Kecamatan Mura Bulian	1. Rapat mediasi antara anggota Tim Terpadu dengan pihak pelapor	<ul style="list-style-type: none"> 13 Desember 2024 	<ul style="list-style-type: none"> Kepada Kelompok Tani Teratai Maju Diharapkan Menyampaikan Salinan Putusan Dan Alas Hak Kepada Tim Terpadu 	Masih dalam proses penyelesaian

<p>Hal Permohonan Lahan 47,76 Ha Diserahkan Pengelolaannya Kepada Kelompok Tani Teratai Maju/Pemerintah Kelurahan Teratai</p>	<p>diserahkan kembali lahan tersebut kepada Masyarakat /Kelompok Tani Teratai Maju dan Pemerintahan Kelurahan Teratai untuk Pemeliharaan dan dimanfaatkan hasil tanaman tumbuh diatasnya untuk kepentingan masyarakat sebagaimana diamanatkan UUD 1945 (bumi air udara serta isinya dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat) selama 13 Tahun lebih justru lahan itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikarenakan kealfaan bersama dalam memelihara lahan tersebut sehingga Tahun 2022 terulang lagi penjualan lahan Ulayat Oleh oknum warga Olak terhadap tanah Ulayat/Negara yang tersambung dari lahan 47,76 Ha yang seluas +109 Ha yang mana saat ini lahan tersebut belum difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemda Batang Hari, oleh karenanya mengingat waktu terlalu beralurut2 				<p>Kabupaten Batanghari ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari Akan Menjadwalkan Rapat Internal Untuk Menelaah Dokumen Dan Akan Membuat Nota Dinas Ke Sekretaris Kabupaten Batanghari Selaku Wakil Ketua I Tim Terpadu 	
---	--	--	--	--	---	--

		<p>maka diambil inisiatif proses pengaduan pidana kepada oknum warga Olak yang menjual tanah perseorangan warga Kelurahan Teratai dan akan segera ditindaklanjuti penjualan tanah Ulayat/Negara sebagaimana pengaduan terhadap Asman Bin Sabar</p> <ul style="list-style-type: none"> Menurut peraturan per-Undang-Undangan pemerintah berkewajiban memelihara dan memanfaatkan tanah Ulayat/Negara untuk kemakmuran masyarakat setempat, (UUPA No.5 Tahun 1960 serta Peraturan Pemerintah dan turunannya) 					
21.	<p>pada tanggal 20 Mei 2022 Kelompok Datuk Alif yang di dampingi oleh Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Provinsi Jambi nomor : 007/MLCK I-jbi/V/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> adapun Lokasi/ Objek lahan yang diklaim seluas 236 Ha merupakan hak garapan Kelompok Datuk Alib, Hal itu diakui oleh PT. BSU /PT. Asiatic Persada berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan Hak Oleh manajemen PT. BSU/ PT. Asiatic Persada pada tanggal 13 Februari 2004 yang mengakui atas hak tanah dan tanam tumbuh diatas tanah 	<p>Kecamatan Bajubang</p>	<p>1. Rapat Mediasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> 17 Desember 2024 	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa permasalahan ini telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk menempuh jalur hukum. Manajemen <p>PT.BSU meminta kepada pihak Datuk Alib Cs yang menduduki HGU PT.BSU untuk segera meninggalkan</p>	<p>Jalur hukum</p>

perihal menerusk an surat ke Polres Batanghari							
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>dengan Perihal permohonan dari Alib CS untuk pendampingan pendudukannya lahan garapannya seluas 236 Ha kepada LCKI provinsi Jambi dan mohon bantuan pengamanannya</p>	<p>seluas 236 Ha garapan Datuk Alif, Untuk Lahan 236 Ha berbeda dengan lahan 78 Ha yang sudah pernah di Konfensasi oleh PT. BSU pada tanggal 7 Juni 2022 dan lahan 236 Ha berada di lokasi 525 Ha di Areal PT. BSU Sei Kandang Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari, Permasalahan Lahan tuntutan Datuk Alib seluas 236 Ha sebelumnya sudah pernah dilakukan mediasi di tingkat Polda tepatnya pada tahun 2017 di Mako Brimob Polda Jambi dan diperoleh hasil kesepakatan bersama bahwa lahan tersebut berada diluar HGU PT. BSU/ Asiatic Persada, Datuk Alib memberikan Kuasa Kepada LCKI Provinsi Jambi dalam upaya penyelesaian Konflik Antara Kelompok Datuk Alif tuntutan 236 Ha dengan pihak Perusahaan PT. BSU Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari terkait tuntutan lahan seluas 236 Ha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Timdu Batanghari dan Instansi dinas terkait sudah melaksanakan rapat 					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>sebanyak 3 (Tiga) Kali :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rapat Timdu Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022b. Rapat Timdu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022c. Rapat Timdu Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 <p>Dikarenakan informasi adanya pendudukan lahan kembali maka Timdu mengadakan rapat untuk meninjau kembali</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--